

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil peneliti berupa wawancara penulis dengan informan peneliti terkait dengan bagaimana proses Implementasi Program Asuransi Usaha Ternak Sapi atau Kerbau Di Kabupaten Lima Puluh Kota yang peneliti analisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Asuransi Usaha Ternak Sapi atau Kerbau Di Kabupaten Lima Puluh Kota belum berjalan dengan efektif. Terkait dengan beberapa hal menyatakan program tersebut belum berjalan dengan efektif sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Untuk Indikator Jelas Dan Terukur

Standar dan sasaran untuk indikator jelas dan terukur yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Asuransi Usaha Ternak Sapi atau Kerbau Di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah memiliki standard an sasaran yang jelas. Sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi atau Kerbau Di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Namun belum semua implementor paham dengan Petunjuk Teknis Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi atau Kerbau tersebut. Dalam pelaksanaan Program Asuransi Usaha Ternak Sapi atau Kerbau di Kabupaten Lima Puluh Kota belum terlaksana secara merata kepada setiap kecamatan, dimana masih banyak terdapat kecamatan-kecamatan yang ada di Kecamatan yang ada Di Kabupaten Lima Puluh Kota yang membutuhkan program asuransi tersebut akan tetapi kegiatan tersebut terhalang oleh anggaran.

2. Sumberdaya

Pada variabel sumberdaya dalam pengimplementasian Program Asuransi Usaha Ternak Sapi atau Kerbau di Kabupaten Lima Puluh Kota diketahui bahwa sumberdaya manusia belum memiliki jumlah yang memadai untuk menjangkau seluruh kelompok penerima Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS/K). Selanjutnya pada indikator sumberdaya financial bahwa anggaran dana yang telah disediakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan belum memadai dan mencukupi. Kekurangan anggaran tersebut dapat dilihat dari masih kurangnya dana transportasi untuk pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi atau Kerbau (AUTS/K). Pada indikator sarana dan prasarana tersebut pelaksanaan Program Asuransi Usaha Ternak Sapi atau Kerbau juga belum memadai. Dapat dilihat dari keterbatasan transportasi yang digunakan untuk melakukan sosialisasi Program Asuransi Usaha Ternak Sapi atau Kerbau kepada kelompok masyarakat penerima Asuransi Usaha Ternak Sapi atau Kerbau (AUTS/K).

3. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi sehubungan dengan Implementasi Program Asuransi Usaha Ternak Sapi Atau Kerbau di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilaksanakan oleh PT. Jasindo dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, pelaksana Asuransi Usaha Ternak Sapi atau Kerbau Kabupaten Lima Puluh Kota belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dimana koordinasi yang dilakukan antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan hanya sebatas pelaporan pelaksanaan program saja.

4. Hubungan Antar Organisasi

Hubungan antar organisasi sudah berjalan dengan baik, namun adanya kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya sanksi kepada Tim Jasindo sehingga lemahnya aturan yang

diterapkan.hal tersebut dapat berdampak pada kinerja dari Tim pelaksana Asuransi Usaha Ternak Sapi atau Kerbau di Kabupaten Limapuluh kota.

5. Disposisi

Untuk variabel disposisi tersebut dapat dilihat bahwa adanya respon baik dari implementor untuk melaksanakan Program Asuransi Usaha Ternak Sapi atau Kerbau Tersebut.Respon implementor tersebut dapat dilihat dari komitmen yang dimiliki implementor untuk pelaksanaan Program Asuransi Usaha Ternak Sapi atau Kebau.Dukungan implementor tersebut terhadap program Asuransi Usaha Ternak Sapi Atau kerbau memiliki suatu tujuan untuk membantu masyarakat.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Pada lingkungan ekonomi dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan program Asuransi Usaha Ternak Sapi atau Kerbau di Kabupaten Lima Puluh Kota Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menganggarkan untuk pelaksanaan Program Asuransi Usaha Ternak Sapi atau Kerbau namun anggaran yang diberikan belum mencukupi dalam pelaksanaan program.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil wawancara yang telah peneliti kemukakan di atas, maka ada beberapa saran-saran yang dapat memperbaiki atau menyempurnakan implementasi Program Asuransi Usaha Ternak Sapi atau Kerbau di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sran-saran tersebut antara lain:

1. Seharusnya dalam pelaksanaan Program Asuransi Usaha Ternak Sapi atau Kerbau tersebut pihak Kabupaten melakukan sosialisasi merata kepada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Dalam pelaksanaan program Asuransi Usaha Ternak Sapi atau Kerbau ini hendaknya pelaksanaan tersebut tidak menduduki dua jabatan, karena akan berdampak pada suatu pengawasan.
3. Perlu adanya penambahan sumberdaya manusia.
4. Perlu adanya ketersediaan anggaran yang mencukupi untuk kegiatan pelaksanaan Program Asuransi Usaha Ternak Sapi atau Kerbau di Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara tim koordinasi pelaksana dalam pelaksanaan Program Asuransi Usaha Ternak Sapi atau Kerbau.
6. Perlu adanya pemahaman implementor tentang tupoksi yang mereka miliki.
7. Perlunya suatu aturan atau norma-norma yang diterapkan dalam pelaksanaan Program Asuransi Usaha Ternak Sapi atau Kerbau yang berguna untuk suatu tingkat kedisiplinan pegawai.

